

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

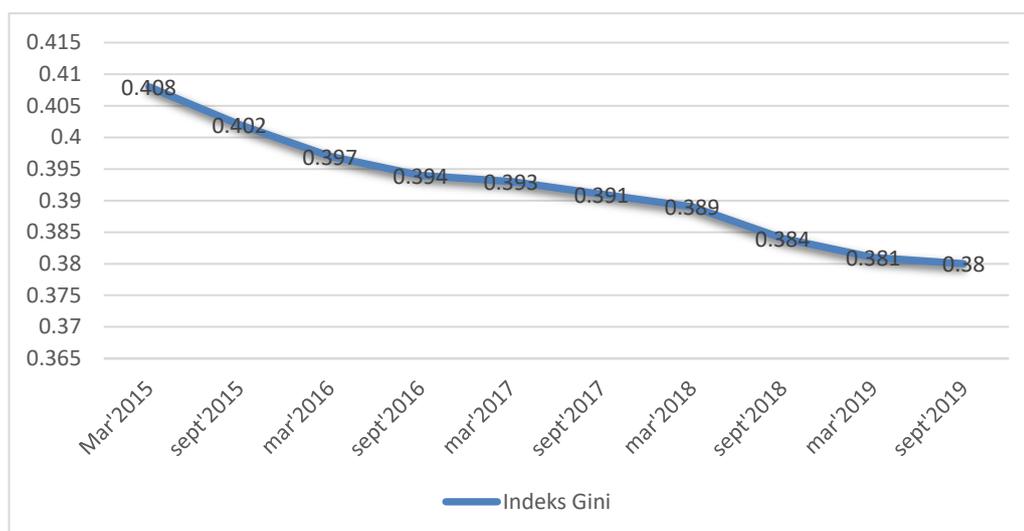
Pembangunan ekonomi merupakan proses yang dapat menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk dari suatu negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan. Tujuan adanya pembangunan yaitu untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan (Arsyad, 2005: 11).

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu masalah yang sering terjadi dalam pembangunan ekonomi. Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat tidak merata, ada yang memiliki pendapatan tinggi dan ada yang rendah. Ketidakmerataan pendapatan ini disebabkan karena adanya perbedaan antar wilayah satu dengan yang lainnya. Hal ini terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang kurang maju atau terbelakang. Setiap daerah memiliki karakteristik dan kondisi masing-masing yang menjadi faktor adanya ketimpangan, diantaranya latar belakang geografis, demografis, potensi sumber daya alam maupun manusia, dan potensi keuangan (fiskal).

Indeks Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang mampu menggambarkan kondisi merata tidaknya pendapatan di suatu daerah yang angkanya berkisar antara 0 yang menunjukkan arti pemerataan sempurna hingga 1

yang menunjukkan arti adanya ketimpangan sempurna. Pada praktiknya, koefisien gini untuk negara-negara yang derajat ketimpangannya tinggi berkisar antara 0.50 hingga 0.70, sedangkan untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif merata, angkanya berkisar antara 0,20 hingga 0,35 (Todaro, 2006: 238).

Ketimpangan pendapatan di Indonesia ditunjukkan dengan indeks gini, di mana sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 nilai indeks gini cenderung mengalami penurunan. Hal ini menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia sudah cukup baik, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1 berikut:

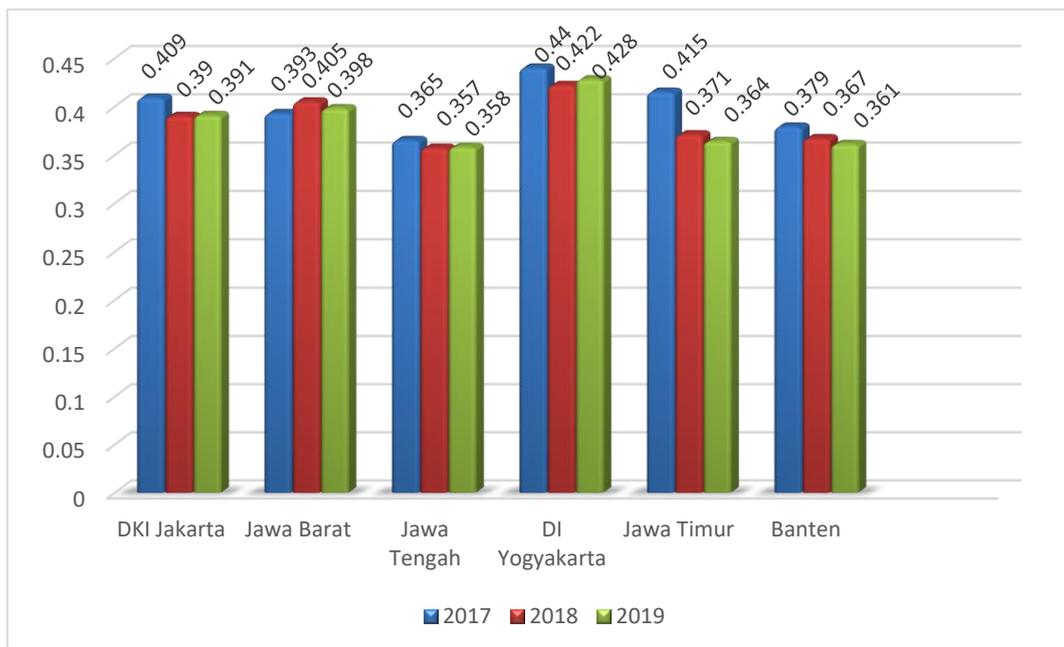


Gambar 1.1 Indeks Gini di Indonesia Maret 2015-September 2019

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

Ketimpangan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 adalah tergolong ketimpangan sedang yaitu sebesar 0,380. Adapun pulau Jawa yang dikenal sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan ternyata memiliki angka ketimpangan diatas angka rata-rata ketimpangan nasional. Berbeda dengan indeks gini Indonesia yang

selalu menurun setiap tahunnya, beberapa provinsi di pulau Jawa justru menunjukkan angka ketimpangan yang cenderung berfluktuatif setiap tahunnya.



Seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini:

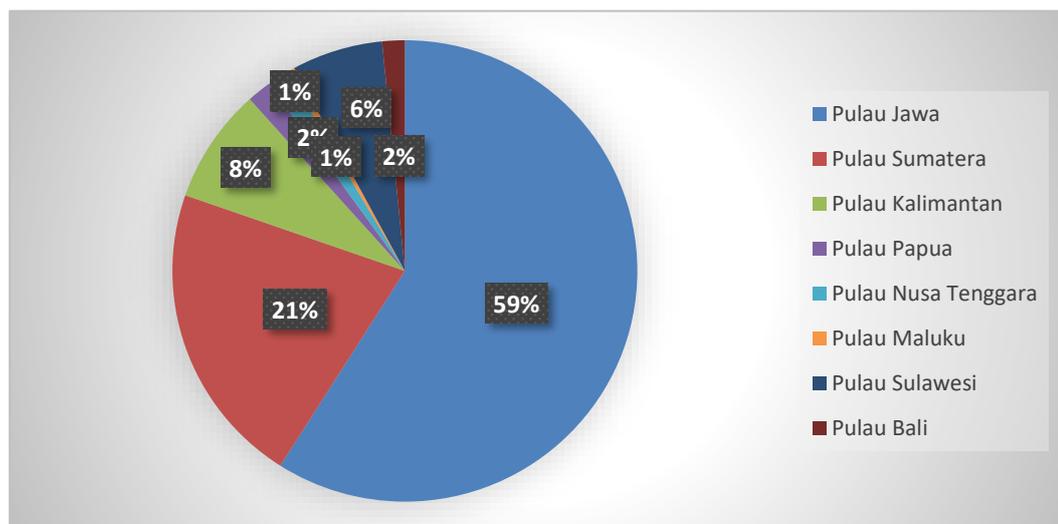
Gambar 1.2 Indeks Gini 6 Provinsi di pulau Jawa tahun 2017-2019

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa indeks ketimpangan yang terdapat pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai angka indeks gini paling tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan angka indeks gini pada tahun 2017 sebesar 0,44, tahun 2018 sebesar 0,422 dan tahun 2019 sebesar 0,428. Keadaan tersebut terlihat bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selain memiliki angka indeks ketimpangan paling tinggi dibandingkan provinsi lain juga angkanya selalu berfluktuasi dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami kenaikan

maupun penurunan angka ketimpangan. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Timur dan Banten setiap tahunnya mengalami penurunan angka indeks gini.

Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Pulau Jawa merupakan pulau dengan sumbangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional dari tahun ke tahun. Diketahui besarnya rata-rata sumbangan PDRB Pulau Jawa pada tahun 2019 mencapai 59% terhadap rata-rata sumbangan Nasional. Angka sumbangan rata-rata tersebut jauh di atas angka rata-rata sumbangan PDRB pulau-pulau lain di Indonesia yang hanya berkisar kurang dari 30%. Angka tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia lebih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa.

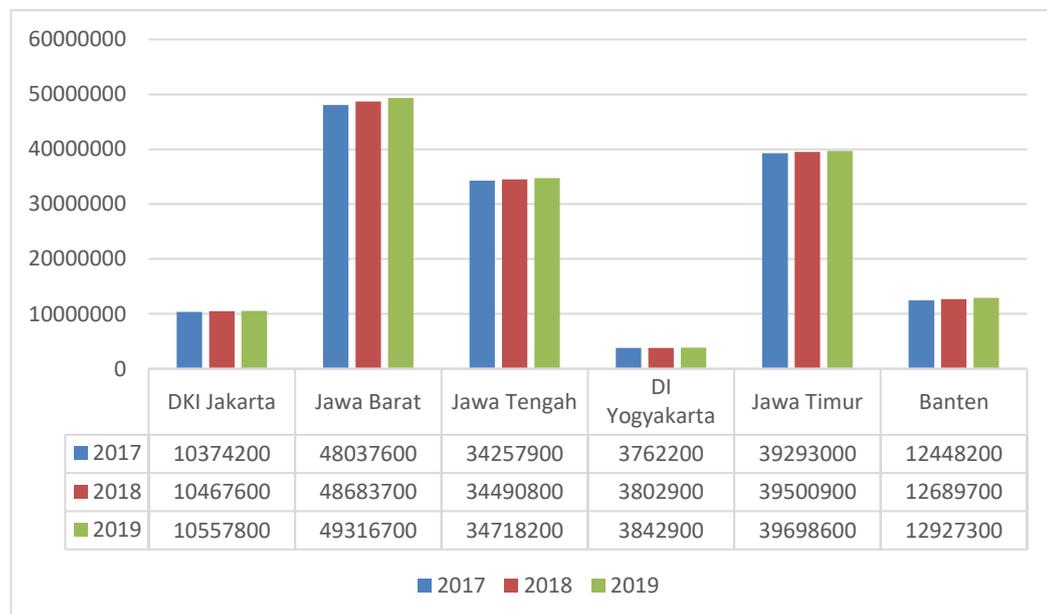


Gambar 1.3 Rata-rata Kontribusi PDRB Pulau-pulau di Indonesia terhadap PDB Nasional

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

Tetapi pada kenyataannya, besarnya PDRB Pulau Jawa belum mencerminkan pencapaian kesejahteraan ekonomi di daerahnya yang ditunjukkan dengan timpangnya distribusi pendapatan dengan besarnya indeks Gini yang berada di atas rata-rata indeks Gini Nasional.

Kondisi ketimpangan distribusi pendapatan tidak bisa dilepaskan dari keadaan demografis. Hasil penelitian Akai dan Sakata (2005) menunjukkan bahwa penduduk merupakan salah satu penyebab meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan. Penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang besar disertai dengan kualitas yang baik akan memberikan suatu keuntungan, namun jika penambahan penduduk tanpa disertai dengan kualitas yang baik maka akan menjadi masalah besar. Sukirno (2016) menjelaskan bahwa perkembangan penduduk yang tinggi dapat menghambat suatu wilayah daerah untuk mencapai salah satu tujuan penting pembangunan ekonomi, yaitu akan menyebabkan jurang yang sudah ada diantara beberapa golongan masyarakat menjadi bertambah lebar. Dari teori tersebut dapat dikatakan dengan bertambahnya



jumlah penduduk dapat berpotensi meningkatkan angka ketimpangan suatu wilayah.

Gambar 1.4 Jumlah Penduduk Per provinsi di pulau Jawa tahun 2017-2019

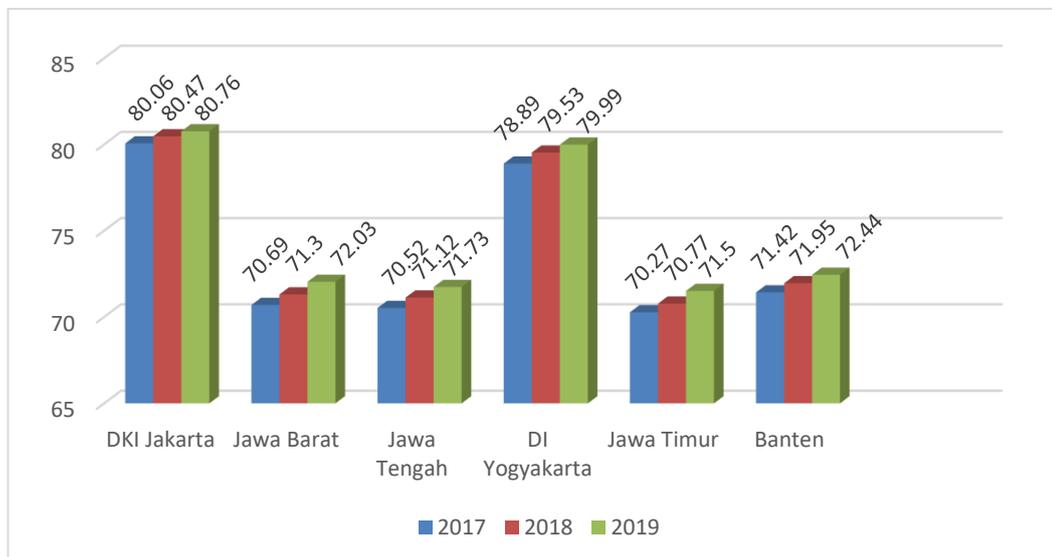
Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui bahwa pada tahun 2017-2019 jumlah penduduk di pulau Jawa selalu bertambah banyak setiap tahunnya. Jumlah penduduk di Pulau Jawa pada tahun 2019 sebanyak 150 juta menunjukkan bahwa lebih dari 56% penduduk di Indonesia mendiami pulau Jawa. Jumlah penduduk yang besar ini juga tidak merata jumlahnya di provinsi-provinsi yang ada di pulau Jawa. Data jumlah penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang mendiami provinsi DIY adalah yang paling sedikit jumlahnya dibanding provinsi lain yaitu sebanyak 3,9 juta jiwa, sementara Jawa Barat memiliki populasi penduduk yang terbanyak sejumlah 49 juta jiwa.

Menurut Arsyad (2016: 341) pola penyebaran penduduk antara daerah pedesaan dan perkotaan yang tidak merata dapat mengakibatkan permasalahan penduduk di daerah perkotaan seperti semakin ketatnya kompetisi dalam memperoleh lapangan kerja yang berakibat meningkatnya jumlah pengangguran yang pada akhirnya akan meningkatkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

Selanjutnya, pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila suatu wilayah atau daerah tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata atau yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM yang tidak merata antar daerah menyebabkan daerah yang IPM-nya lebih tinggi akan memiliki kualitas manusia yang baik sehingga dapat menunjang pembangunan yang baik begitu pula sebaliknya. Menurut Todaro (2011: 57) IPM atau *Human Development Index (HDI)* merupakan indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosio-ekonomi suatu negara, yang mengombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan dan

pendapatan riil perkapita yang disesuaikan. Gambar 1.5 memperlihatkan perkembangan IPM pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2017-2019:



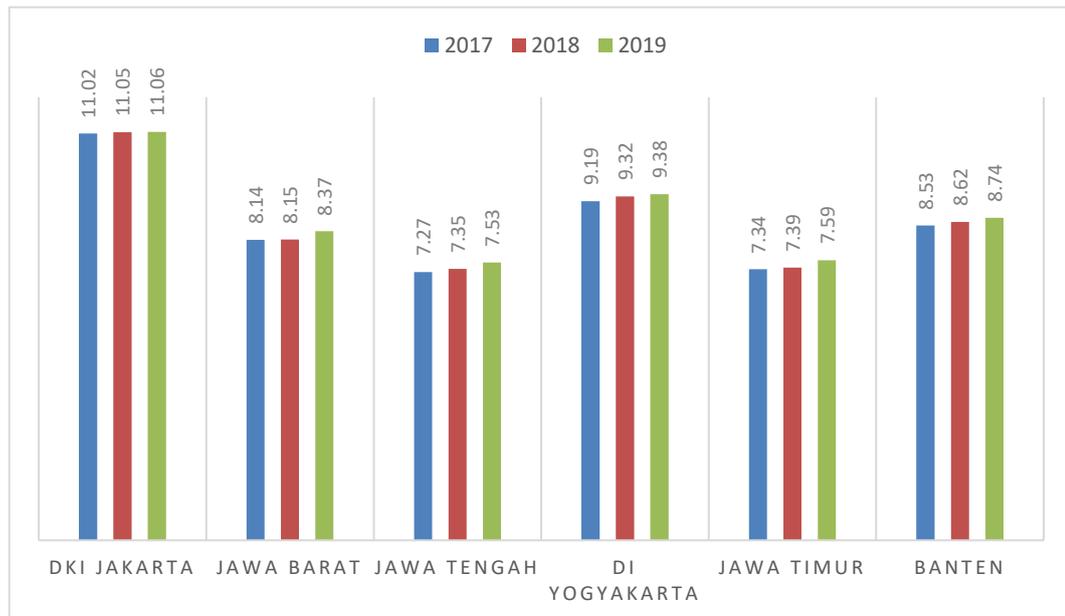
Gambar 1.5 Indeks Pembangunan Manusia 6 Provinsi di pulau Jawa tahun 2017-2019

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017-2019 pada Gambar 1.5 menunjukkan bahwa pemerataan IPM di pulau Jawa terdapat perbedaan di setiap provinsinya. Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama dengan IPM pada tahun 2019 sebesar 80,76 diikuti provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 79,99, kemudian provinsi Banten sebesar 72,44, Jawa Barat sebesar 72,03, Jawa Tengah sebesar 71,73 dan Jawa Tmur sebesar 71,50.

Indikator pembangunan manusia yang pertama yaitu bidang pendidikan. Pendidikan selalu menjadi masalah utama dalam pembangunan. Menurut Todaro (2011) pendidikan memainkan peran penting untuk meningkatkan kemampuan suatu negara berkembang dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas diri bagi terwujudnya pertumbuhan dan pembangunan. Indikator bidang

pendidikan dapat dilihat dari besarnya nilai Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Variabel rata-rata lama sekolah dapat menggambarkan kualitas pendidikan yang dimiliki oleh setiap penduduk yang mendiami suatu wilayah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani.



Perkembangan nilai rata-rata lama sekolah 6 provinsi di pulau Jawa pada tahun 2017-2019 dapat dilihat dari gambar berikut:

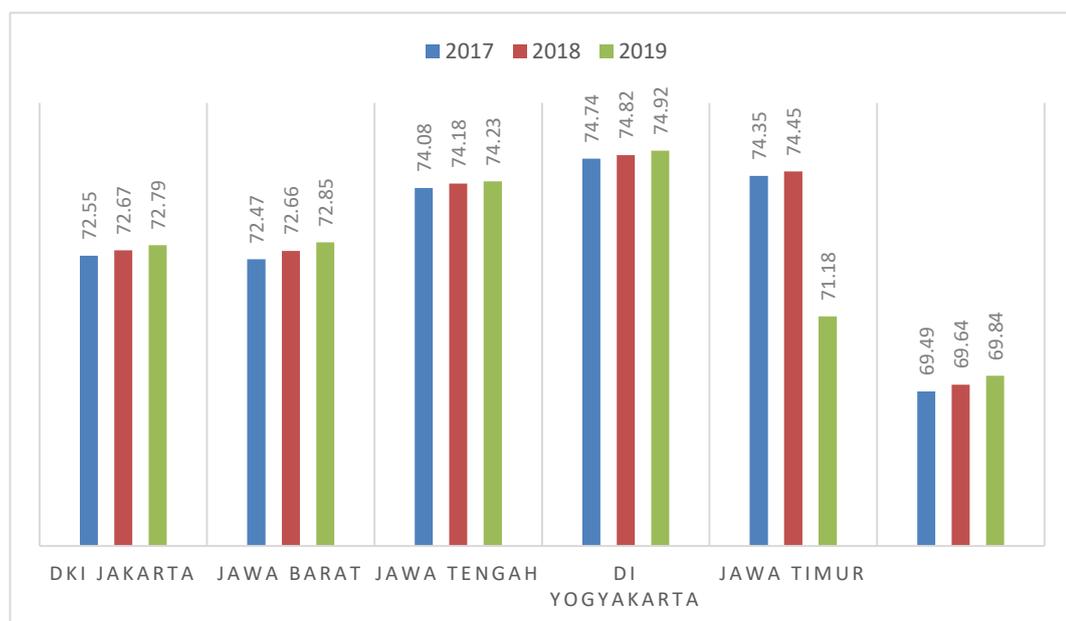
Gambar 1.6 Rata-rata Lama Sekolah 6 Provinsi di Pulau Jawa tahun 2017-2019

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

Berdasarkan gambar 1.6 dapat dilihat bahwa setiap provinsi memiliki angka rata-rata lama sekolah yang selalu meningkat setiap tahunnya. Penduduk di provinsi DKI Jakarta memiliki angka rata-rata lama sekolah yang tinggi diantara provinsi lainnya yaitu sebesar 11,06 pada tahun 2019. Sedangkan provinsi Jawa Timur memiliki angka terendah yaitu sebesar 7,53 pada tahun 2019.

Selanjutnya, indikator pembangunan manusia yang kedua yaitu bidang kesehatan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kesehatan merupakan hal penting yang

harus dimiliki oleh setiap manusia. Menurut Todaro (2011) kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas dan pendidikan yang berhasil juga sangat bergantung kepada kesehatan yang memadai. Indikator bidang kesehatan dapat dilihat dari besarnya nilai Umur Harapan Hidup (UHH). Umur harapan hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. Umur harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) 6 provinsi di pulau Jawa pada tahun 2017-2019 dapat dilihat pada gambar berikut:



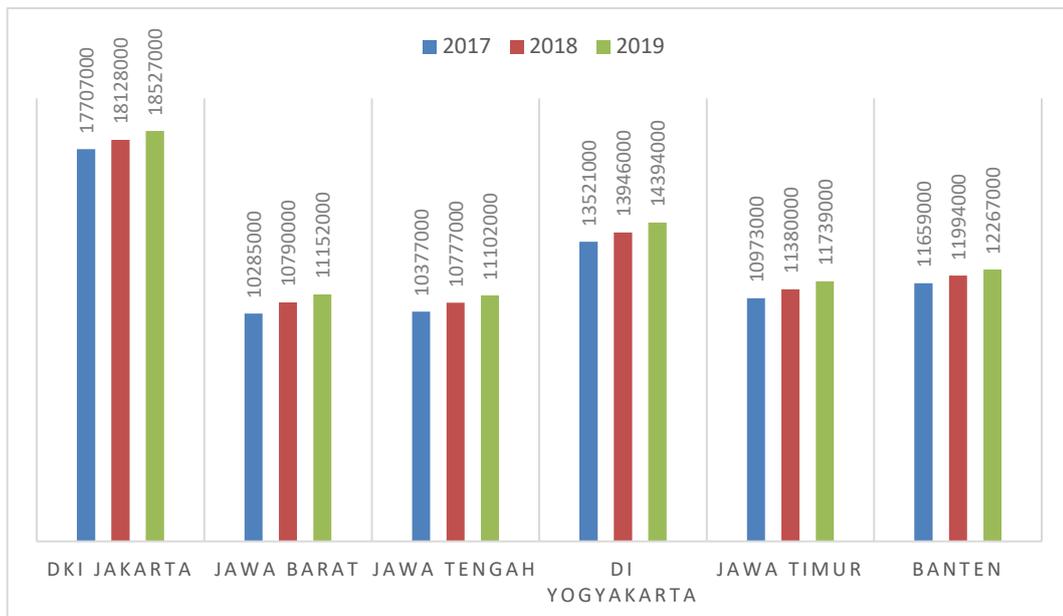
Gambar 1.7 Umur Harapan Hidup 6 Provinsi di Pulau Jawa tahun 2015-2019

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

Berdasarkan gambar 1.7 menunjukkan bahwa pada setiap tahunnya umur harapan hidup di setiap provinsi mengalami peningkatan, kecuali provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 3,27 tahun. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki umur harapan hidup tertinggi diantara provinsi

lainnya yaitu sebesar 74,92 tahun pada 2019. Sedangkan provinsi Banten memiliki umur harapan hidup terendah yaitu sebesar 69,84 tahun pada 2019.

Selanjutnya, indikator pembangunan yang ketiga adalah daya beli atau standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Besarnya daya beli masyarakat dapat dilihat dari pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Perhitungan pengeluaran perkapita dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan pokok yang disesuaikan. Perkembangan daya beli 6 provinsi di pulau jawa pada tahun 2017-2019 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.8 Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan 6 Provinsi di Pulau Jawa tahun 2017-2019

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

Berdasarkan gambar 1.8 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengeluaran perkapita di setiap provinsi setiap tahunnya. Provinsi DKI Jakarta

memiliki angka pengeluaran perkapita tertinggi diantara provinsi lainnya yaitu sebesar Rp 18.527.000 pada tahun 2019. Sedangkan provinsi yang memiliki angka pengeluaran perkapita terendah yaitu provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 11.102.000 pada tahun 2019.

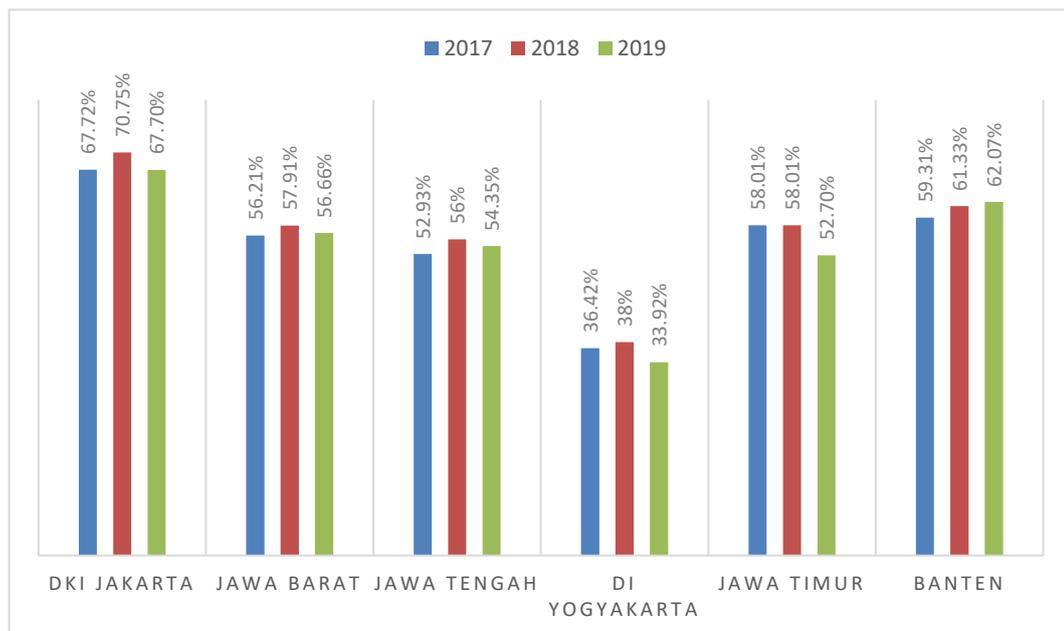
Terdapat tiga indikator yang menjadi komposisi sebagai perbandingan pengukuran IPM yakni tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan daya beli dimana ketiga indikator ini saling mempengaruhi satu sama lain. Perbedaan nilai disetiap indikatornya dapat menjadikan ketiga bidang tersebut sebagai alat untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa.

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki tanggungjawab dalam mengarahkan dan menjalankan pembangunan mengerahkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang ada di Indonesia, baik sosial maupun ekonomi. Namun kita ketahui bahwa tanggung jawab yang besar atas 34 provinsi di Indonesia ini akan berjalan dengan baik apabila wewenang dan tugas daerah tidak sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah pusat. Penerapan sistem desentralisasi dalam otonomi daerah merupakan kebijakan yang dipandang sebagai usaha mewujudkan pembangunan yang merata tersebut.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi dijelaskan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Barzelay (dalam Hadi, 2009: 106), peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses

pembangunan merupakan tujuan dari adanya otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal.

Salah satu tolak ukur keberhasilan desentralisasi adalah besarnya nilai derajat desentralisasi fiskal pada suatu daerah. Derajat desentralisasi fiskal dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerah dan kemandirian daerah. Tim Fisipol UGM (dalam Hessel, 2007) membagi kemampuan keuangan daerah menjadi enam kategori, dimana daerah dengan derajat desentralisasi fiskal lebih dari 50% memiliki kemampuan keuangan daerah yang sangat baik.



Gambar 1.9 Derajat Desentralisasi Fiskal 6 Provinsi di Pulau Jawa tahun 2017-2019

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

Menurut data dari BPS perkembangan derajat desentralisasi fiskal setiap provinsi mengalami kenaikan maupun penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki indeks ketimpangan yang cukup tinggi

juga merupakan provinsi dengan derajat desentralisasi fiskal terendah dibanding lima provinsi lain yaitu sebesar 33,92% pada tahun 2019. Sementara itu lima provinsi lain di Pulau Jawa memiliki derajat desentralisasi fiskal yang lebih tinggi dibandingkan Daerah Istimewa Yogyakarta. DKI Jakarta memiliki derajat desentralisasi fiskal tertinggi sebesar 67,70% diikuti Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing sebesar 62,07%; 56,66%; 54,35%; dan 52,70% pada tahun 2019.

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi yang diyakini mampu untuk mengurangi ketimpangan perlu dikaji lebih jauh apakah hal ini juga dapat membawa pengaruh yang baik. Hal ini di dasarkan pada data dimana Daerah Istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta yang memiliki indeks Gini tertinggi dibanding provinsi lain di Pulau Jawa ternyata memiliki derajat desentralisasi fiskal terendah dan tertinggi di pulau Jawa.

Indeks Gini yang cukup tinggi di beberapa provinsi di pulau Jawa serta beberapa pencapaian yang tidak merata mengindikasikan bahwa permasalahan tersebut turut berperan dalam terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa. Adapun bentuk dari hubungan tersebut perlu diteliti lebih jauh. Apabila aspek-aspek tersebut mampu membawa kebaikan dalam pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan, maka hal ini dapat dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengangkat topik dalam penelitian ini dengan judul **“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan 6 Provinsi di Pulau Jawa tahun 2015-2019”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang telah disusun dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, dimensi daya beli) dan derajat desentralisasi fiskal secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan 6 provinsi di pulau Jawa pada tahun 2015–2019?
2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, dimensi daya beli) dan derajat desentralisasi fiskal secara bersama-sama terhadap ketimpangan pendapatan 6 provinsi di pulau Jawa pada tahun 2015-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai identifikasi masalah yang telah disusun oleh peneliti maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui:

1. Pengaruh jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, dimensi daya beli) dan rasio derajat desentralisasi fiskal secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan 6 provinsi di pulau Jawa pada tahun 2015–2019.
2. Pengaruh jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, dimensi daya beli) dan rasio derajat desentralisasi fiskal secara bersama-sama terhadap ketimpangan pendapatan 6 provinsi di pulau Jawa pada tahun 2015-2019.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak seperti bagi peneliti, bagi mahasiswa, bagi pemerintah dan pihak lainnya. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini berguna bagi peneliti sebagai adanya wujud dalam penerapan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama duduk di bangku perkuliahan juga sebagai syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S1) dan dapat memberikan ilmu baru bagi peneliti.

2. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan atau bahkan ide sehingga dapat memperkaya penelitian yang sejenis yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian sebelumnya.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akan berguna bagi pemerintah atas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan di pulau Jawa sehingga kedepannya pemerintah dapat mengatasi permasalahan mengenai ketimpangan pendapatan.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data sebagai bahan penelitian ini secara sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) serta jurnal-jurnal yang didapat dari internet.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini dibuat dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan dapat diselesaikan sesuai dengan matriks yang direncanakan. Penelitian ini dimulai sejak bulan Oktober 2020 yang diawali dengan pengajuan judul kepada pihak prodi Ekonomi Pembangunan. Berikut matriks jadwal penelitian:

Tabel 1.1 Matriks Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/Tahun 2020-2021																			
		Oktober				Nov				Des				Jan				Feb			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■																			
2	Penyusunan Usulan Penelitian		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
3	Pengajuan Usulan Penelitian											■	■	■	■						
4	Sidang Usulan Penelitian													■	■	■	■				
5	Revisi Usulan Penelitian													■	■	■	■				
5	Pengolahan data dan penyusunan skripsi													■	■	■	■	■	■		
6	Pendaftaran sidang komprehensif																■	■	■	■	
7	Sidang komprehensif																	■	■	■	■
9	Revisi skripsi																		■	■	■